

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ASEAN dikenal sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yakni semacam organisasi regional antar negara anggota Asia Tenggara dimana saling bekerja sama dalam isu-isu geopolitik dan ekonomi. Beberapa negara yang tergabung meliputi, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, Filipina, serta Myanmar. Pendirian dari ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) pertama kali di Bangkok tepatnya tanggal 8 Agustus 1967, oleh Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dalam upacara pembukaan KTT ASEAN, para pemimpin menyampaikan keinginan mereka untuk membentuk kawasan yang sejahtera, stabil, dan aman di Asia Tenggara. Negara-negara di ASEAN menegaskan komitmen untuk memperkuat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Pembangunan ekonomi yakni serangkaian kegiatan yang suatu negara lakukan dalam jangka panjang dengan tujuan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. Pembangunan dapat dimaknai sebagai suatu proses dari berbagai aspek yang melibatkan perubahan signifikan pada kelembagaan, sikap, mental dan struktur sosial, terdapat juga di dalamnya laju perubahan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan (Todaro, 2000). Mengacu pemaparan dari Tambunan (2001), pembangunan ekonomi telah menyebabkan peningkatan pendapatan dan kekayaan nasional, serta perubahan struktural dalam perekonomian. Perubahan tersebut terjadi dari struktur ekonomi tradisional dengan sektor utamanya adalah Pertanian ke sektor non-primer dengan struktur ekonomi modern terutama manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang utama.

Proses pembangunan ekonomi dicirikan oleh periode pertumbuhan ekonomi per kapita yang dilihat dari PDB yang cepat dikombinasikan dengan perubahan struktural. Sementara itu, perubahan struktural dapat diartikan sebagai

pelaksanaan langkah-langkah kebijakan ekonomi di tiga sektor utama, yakni sektor industri, jasa dan pertanian, dimana kesemuanya memiliki potensi untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Kuznets dalam (Jhingan, 2014) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi modern terdiri dari enam bagian, yaitu produk per kapita dan pertumbuhan penduduk, laju perubahan struktural, peningkatan produktivitas, urbanisasi, perluasan negara industri, aliran barang modal dan manusia antar bangsa.

Pembangunan ekonomi sendiri memiliki tujuan utama guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan sendiri adalah istilah yang singkat, tetapi dalam merealisasikannya tergolong cukup sulit. Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita dan juga tujuan utama dari tiap negara. Taraf kesejahteraan sebuah negara adalah indikator yang menentukan seberapa berhasilnya pembangunan di negara tersebut. Tentunya masyarakat yang sejahtera menjadi tujuan hidup, akan tetapi kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa usaha apapun. Peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap negara. Sukirno (2008) mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi suatu wilayah.

International Monetary Fund (IMF) mempublikasikan prospek ekonomi kawasan Asia dalam perekonomian global diketahui bahwa Asia berada di garis depan pertumbuhan ekonomi global dengan menyumbang sebesar lebih dari 60% pertumbuhan dunia walaupun secara keseluruhan pendapatan perkapita di Asia masih jauh dibawah Amerika Serikat dan Eropa (*International Monetary Fund*, 2018). Ekonomi APEC memainkan peran besar dalam perekonomian global. Pada tahun 2018, kawasan APEC memiliki 38% populasi dari populasi global dan memberikan kontribusi sebesar 55% terhadap GDP (APEC, 2021). Asia Tenggara termasuk kedalam bagian kawasan Asia Timur dan Pasifik yang merupakan salah satu wilayah Asia yang luas, terletak di sebelah timur benua India dan selatan Tiongkok yang terdiri dari 10 (sepuluh) negara. Selain itu negara kawasan Asia Tenggara termasuk kedalam 25 besar negara dengan jumlah penduduk tertinggi di

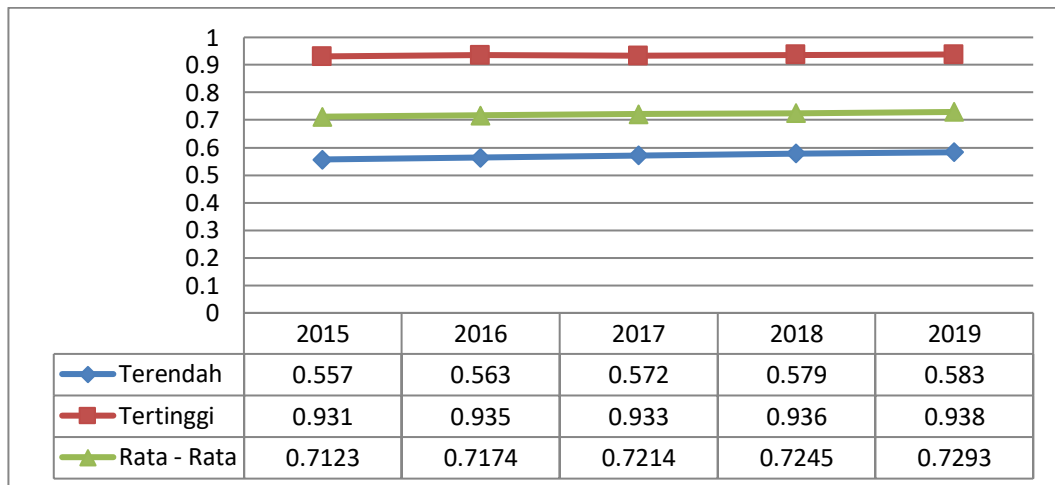
dunia. Dimana 6 dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara masuk kedalam 10 besar negara dengan tingkat penduduk tertinggi didunia bahkan Indonesia merupakan peringkat 2 di dunia.

Dari sepuluh negara yang menjadi anggota ASEAN itu, rata-rata status negara tersebut masih sebagai negara berkembang. Hal ini disebabkan karena rata-rata negara ASEAN belum memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai negara maju. Ciri negara maju menurut IMF (*International Monetary Fund*) adalah pendapatan per kapita tinggi, angka harapan hidup tinggi, pertumbuhan penduduk yang rendah, kualitas tinggi sumber daya manusia dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi berbasis jasa dan industri, sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan, tingkat pendidikan rata-rata tinggi, angka kematian bayi kecil.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dapat melaju secara cepat, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tentunya harus diikuti dengan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Pada periode tahun 2015 hingga 2019, ekonomi di ASEAN dalam pertumbuhannya rata – rata mengalami fluktuasi berkisar antara 4% sampai dengan 5% (*World Bank, 2021a*). Pada tahun 2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi di ASEAN senilai 4,62% dan naik selama periode 2016 sampai 2017 menjadi 5,42%. Namun pada tahun 2018 hingga 2019 rata – rata pertumbuhan ekonomi di ASEAN terus menurun menjadi 4,93% pada 2019. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara dapat berjalan dengan pesat, namun kesejahteraan ekonomi masyarakatnya pada kenyataannya masih perlu ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara tidak otomatis menjamin kesejahteraan warga negara tersebut apabila variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mendukung dan tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Pertumbuhan ekonomi setiap negara berbeda-beda dikarenakan perbedaan dalam pencapaian penerimaan negara, Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui berbagai tahapan sebelum mencapai tingkat terbaik dan diikuti dengan pembangunan ekonomi dalam bentuk

mentalitas ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tolak ukur terpenting dalam kesejahteraan negara (Colen et al., 2012). Kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan peran masyarakat atau penduduk, sebab dalam hal ini penduduk adalah tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat. Selain itu, indeks tersebut juga dipergunakan dalam melihat pengaruh yang diakibatkan dari usaha meningkatkan kemampuan modal dasar manusia. Peningkatan Indikator *Human Development Index* (HDI) dijadikan acuan untuk Pembangunan Ekonomi yang mana ini adalah indeks komposit yang meliputi aspek-aspek utama pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi (Asang, 2019). Pembangunan sumber daya manusia sangat penting karena manusia adalah unsur terpenting dalam suatu komunitas. Seberapa berhasilnya pembangunan terlihat dari besarnya kemajuan dalam sektor ekonomi yang bisa diketahui dari terjadinya peningkatan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai oleh masing-masing wilayah.



Sumber : UNDP, 2021

Gambar 1.1. Perkembangan *Human Development Index* (HDI) Negara-Negara di ASEAN Tahun 2015 – 2019

Mengacu pada data yang dirilis oleh *United Nation Development Programme* (UNDP), capaian nilai HDI negara dibagi kedalam empat kategori. Kategori tersebut antara lain 1) *Low Human Development* $HDI < 0,550$; 2) *Medium Human Development*, $0,550 \leq HDI < 0,699$; 3) *High Human*

Development, $0,700 \leq \text{HDI} < 0,799$; dan 4) *Very High Human Development*, $\text{HDI} \geq 0,800$. Rata – rata nilai HDI negara di ASEAN pada rentang waktu 2015 – 2019 meningkat sepanjang tahun menjadi 0,7293 pada tahun 2019 dari yang sebelumnya 0,7123 pada tahun 2015 (UNDP, 2020). Nilai HDI tertinggi di ASEAN pada periode tahun 2015 – 2019 selalu dicapai oleh negara Singapura. Sementara capaian nilai HDI terendah di ASEAN selama tahun 2015 – 2019 dicapai oleh negara Myanmar. Selama rentang waktu tahun 2015– 2019, capaian HDI terendah di ASEAN yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,557 yang masuk dalam kategori *Medium Human Development*. Sedangkan HDI tertinggi di ASEAN yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,938 atau termasuk dalam kategori *Very High Human Development*. Walaupun nilai HDI Asia Tenggara selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hanya negara Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia yang selalu berada pada kategori *Very High Human Development*.

Dalam meningkatkan standar pembangunan manusia terdapat beberapa masalah, salah satunya adalah disparitas atau kesenjangan kualitas pembangunan manusia antar negara. Disparitas kualitas pembangunan manusia antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas hidup dan kualitas pembangunan antar wilayah. Berdasarkan piagam ASEAN, tujuan ASEAN di antaranya yakni guna menunjang peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat ASEAN melalui upaya memberikan keadilan akses pada kesempatan untuk pembangunan manusia, keadilan serta kesejahteraan sosial (UNDP, 2014). Perbedaan klasifikasi capaian HDI diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara menunjukkan perbedaan kualitas pembangunan manusia yang pada akhirnya menunjukkan tingkat kesejahteraan negara tersebut.

Menurut Jude & Levieuge dalam (Pramuji, 2020) Pemerintah adalah kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena lemahnya kualitas kelembagaan berkaitan dengan banyaknya masalah ekonomi, seperti investasi yang rendah, pertumbuhan produktivitas yang lebih lambat, menurunkan pendapatan per kapita, dan pertumbuhan output yang lebih lambat. Oleh karena itu, diperlukan lembaga-lembaga standar yang baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian negara yang mendukung kesejahteraan. Kohli, Sarma, & Sood

dalam (Pramuji, 2020) berpendapat bahwa negara-negara Asia menghadapi berbagai masalah tata kelola, termasuk manajemen keuangan untuk kontes publik dan masalah korupsi. Efisiensi pemerintah dan tingkat kerusakan menjadi bagian dari ukuran kualitas negara (*World Bank*, 2005).

Menurut Blackburn et. al., (2006) korupsi dapat dipahami sebagai salah satu sumber dari rendahnya pendapatan suatu negara serta memegang peran penting dalam menciptakan jebakan kemiskinan. Tingkat korupsi suatu negara dicerminkan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diterbitkan oleh *Transparency International* setiap tahunnya. CPI direpresentasikan dalam bentuk bobot skor CPI yang dimulai dari angka 0 hingga 100. Adapun hasil skor CPI tersebut akan menjelaskan tingkat baik dan buruknya korupsi suatu negara, dimana jika semakin mendekati angka 100 maka suatu negara direpresentasikan mempunyai tingkat korupsi yang semakin baik dan sebaliknya bila skor CPI yang dicapai oleh suatu negara mendekati 0, maka suatu negara diartikan memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan semakin buruk.

Beberapa negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sebagian besar merupakan kelompok negara berkembang yang memiliki tingkat korupsi termasuk tinggi, sedangkan negara maju di kawasan Asia Tenggara hanya negara Singapura, sedangkan Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan kelompok negara berkembang yang tergolong makmur. Pada tahun 2018, negara Singapura berada pada posisi nomor tiga dengan tingkat skor CPI paling tinggi di dunia yang mengartikan tingkat korupsi di negara ini hampir bersih dari 180 negara di dunia. Selama rentang waktu tahun 2015 – 2019, negara Myanmar dan Kamboja memiliki skor CPI terendah di ASEAN. Pada tahun 2011 dan 2012 Myanmar berada pada urutan negara ketiga dengan skor korupsi tertinggi didunia yaitu 15. Sedangkan negara Kamboja dari tahun 2015 hingga 2019 berada pada skor CPI antara 20 sampai 21, artinya negara Kamboja merupakan negara dengan tingkat pertama korupsi tertinggi di ASEAN dan berada pada urutan 162 dari 180 negara di dunia, yang mengartikan bahwa Kamboja berada pada peringkat 18 sebagai negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia pada tahun 2019 (*Transparency International*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Chetwynd (2003) menggambarkan bahwa salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di suatu negara adalah korupsi. Tingginya tingkat korupsi suatu negara akan mempengaruhi investor untuk berinvestasi, hal ini akan berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi menyebabkan kurang efisiennya alokasi sumber daya ekonomi dan menjadikan lebih mahal biaya distribusi dan produksi barang dimana pada gilirannya bisa menyebabkan *high cost economy*. Mengacu pemaparan dari Alatas dalam (Islamiyah, 2019) maraknya korupsi di berbagai negara berkembang dikarenakan upah pegawai negeri yang tidak mencukupi hingga membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan mendorongnya untuk melakukan tindakan korupsi.

Tingkat kesejahteraan negara dapat pula dilihat dari jumlah pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran disuatu negaradalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Menurut Dornbusch Fischer dan Startz (2011) kesejahteraan individu bergantung pada konsumsi barang dan jasa seumur hidup. Apabila masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat melakukan konsumsi barang dan jasa dikarenakan tidak maksimalnya tingkat pendapatan, maka kesejahteraan masyarakat akan terganggu sehingga masyarakat tersebut akan masuk kedalam kelompok masyarakat miskin (Arsyad, 2010).

Masalah pengangguran di negara-negara Asia Tenggara tidak dapat dianggap remeh karena laju tingkat pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh laju angkatan kerja yang bertumbuh relatif lebih singkat dibandingkan laju pertumbuhan lapangan kerja. Tingkat pengangguran negara ASEAN selama periode 2015– 2019 mengalami fluktuasi antara 2% – 3%. Pada periode tahun 2015 hingga 2017 rata – rata tingkat pengangguran mengalami peningkatan menjadi 2,85% dari 2,6% pada tahun 2015. Negara yang memiliki angka pengangguran tertinggi di ASEAN selama periode 2015 – 2019 adalah negara Brunei Darussalam. Sedangkan negara yang memiliki tingkat pengangguran

terendah adalah negara Kamboja. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran di Brunei Darussalam menyentuh angka 9,32% (*World Bank, 2021b*).

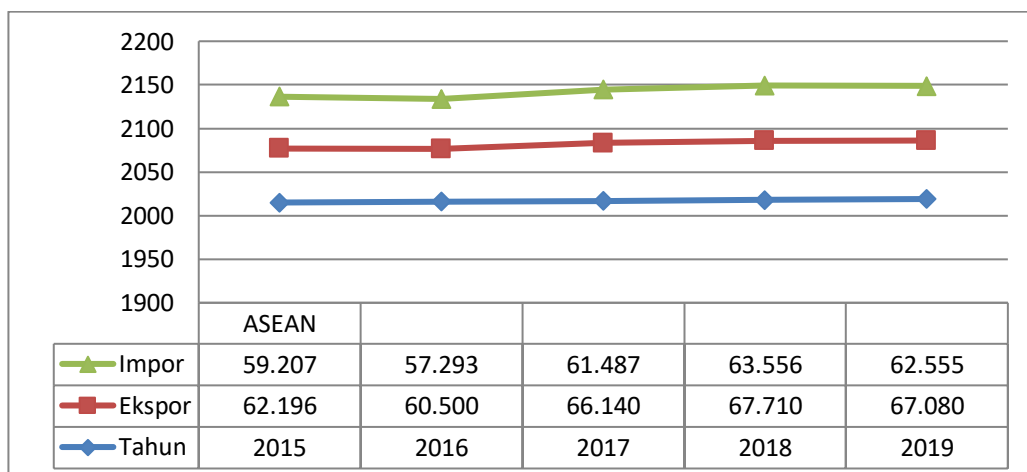
Brunei Darussalam merupakan negara dengan angka pertumbuhan ekonomi terendah serta angka pengangguran tertinggi daripada negara-negara lain di ASEAN pada kurun waktu tahun 2015 – 2019. Dornbusch dalam (Pramuji, 2020) menyebutkan bahwa antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan. Keterkaitan tersebut dapat dilihat apabila tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung rendah. Sebaliknya, apabila tingkat pengangguran rendah maka tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung tinggi. Pengangguran merupakan masalah bagi sebagian negara yang memiliki pertumbuhan penduduk dengan tingkat yang tinggi. Tingginya pengangguran menjadi masalah mendasar dalam ketenagakerjaan apabila rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang didominasi angkatan kerja seharusnya dapat dijadikan modal dalam pembangunan dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pertumbuhan penduduk di ASEAN selama periode tahun 2015 – 2019 Rata – rata mengalami fluktuasi berkisar 1,02% hingga 1,09% (*World Bank, 2021c*). Pertumbuhan penduduk akan berdampak kepada kemiskinan dan kesejahteraan apabila penduduk tidak memiliki kapasitas produksi yang tinggi. Aspek krusial untuk mengevaluasi kinerja pembangunan yakni seberapa efisien ketersediaan sumber daya digunakan sehingga tenaga kerja yang tersedia dapat diserap oleh lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk akan memicu peningkatan jumlah tenaga kerja. Berbagai macam teori dan kerangka empiris yang menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak dilihat sebagai satu kesatuan dalam menghasilkan output, tetapi dilihat dari bagaimana interaksi dari standar tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain guna menghasilkan nilai tambah (Wahyuningsih, 2009).

Negara-negara di Asia Tenggara menganut sistem ekonomi terbuka yang dipengaruhi perkembangan internasional dan berdampak signifikan bagi beberapa negara ASEAN yang menjadikan ekspor sebagai orientasi untuk strategi

pembangunan ekonomi dan industrinya dikarenakan kawasan di Asia Tenggara memiliki kelimpahan sumber daya alam sehingga sering dijadikan sumber mata pendapatan bagi penduduk. Selain itu, hubungan ekonomi antar negara saling terkait karena pada hakikatnya tidak ada suatu negara di dunia yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negaranya untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya, oleh sebab itu maka terjadilah perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan transaksi perdagangan antar negara baik berupa barang ataupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Pada dasarnya, kegiatan perdagangan internasional antar negara menyangkut kegiatan penawaran dalam bentuk ekspor dan permintaan dalam bentuk impor.

Berdasarkan dari teori biaya absolute Adam Smith, hingga teori biaya komparatif David Ricardo dan teori perdagangan baru Krugman, selalu dikatakan bahwa perdagangan internasional adalah mesin raksasa pertumbuhan ekonomi (Han & Zhang, 2012). Ada banyak negara berkembang di Asia mengadopsi kebijakan perdagangannya untuk mengejar keuntungan dari perdagangan internasional dengan mencari kelimpahan sumber daya dan keunggulan komparatifnya (Bounthone, 2012). Berikut perkembangan ekspor-impor negara di ASEAN Tahun 2015 – 2019.



Sumber: *World Bank*, 2021

Gambar 1.2. Perkembangan Ekspor-Impor di Negara-Negara ASEAN Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan data dari *World Bank*, rata – rata ekspor dan impor ASEAN periode 2015-2019 berfluktuasi antara 57 – 67%. Rata – rata kegiatan Ekspor negara-negara di ASEAN selama rentang waktu 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan yakni dari 62,19% pada 2015 menjadi 67,08% pada tahun 2019. (*World Bank, 2021d*). Sementara itu, rata – rata kegiatan impor di negara-negara ASEAN juga mengalami peningkatan dari 59,20% pada 2015 menjadi 62,55% pada 2019 (*World Bank, 2021e*). Negara Singapura menjadi negara yang memiliki kegiatan ekspor dan impor tertinggi di ASEAN selama 2015 hingga 2019. Tingginya ekspor-impor negara Singapura dikarenakan posisinya yang strategis sehingga menjadi pusat perdagangan internasional di ASEAN. Selain itu, Singapura memiliki kualitas infrastruktur dan teknologi yang efisien dan canggih diikuti dengan kualitas SDM yang terampil maka negaranya mampu melakukan kegiatan impor terhadap bahan mentah dari berbagai negara untuk kemudian diolah dan diekspor kembali ke negara-negara lainnya, sehingga hal inilah yang menjadikan kegiatan ekspor-impor di Singapura menjadi tinggi. Kemudian, hal tersebut juga didukung dengan proses birokrasi yang cepat serta adanya standarisasi produk sehingga produk yang diperdagangkan dapat dipercaya. Sementara itu, negara yang memiliki kegiatan ekspor dan impor paling rendah di ASEAN adalah negara Myanmar pada tahun 2015 dan negara Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019.

Berdasarkan uraian mengenai variabel *Human Development Index* (HDI), *Corruption Perception Index* (CPI), tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan penduduk serta Ekspor-Import pada latar belakang dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara menentukan kualitas dan keadaan negara tersebut. Tentunya masyarakat yang sejahtera menjadi tujuan hidup, akan tetapi kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa usaha apapun. Peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap negara. Oleh karena itu, untuk melihat kesejahteraan sebuah negara bukan sebatas berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi saja, namun disisi lain

dilihat dari bagaimana berbagai indikator lain mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, seperti kualitas sumberdaya manusia yang dilihat dari indeks pembangunan manusia, kualitas kelembagaan yang dilihat dari tingkat Korupsi, penyerapan tenaga kerja dilihat dari tingkat Pengangguran, sumber daya manusia dilihat dari tingkat Pertumbuhan Penduduk maupun laju ekspor impor suatu negara. Oleh sebab itu, berangkat dari uraian tersebut maka penulis menjadikan **“Kesejahteraan Masyarakat ASEAN: Dimensi Beberapa Variabel Makroekonomi dan Kependudukan”** sebagai judul penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada konteks latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, *Human Development Index* (HDI), *Corruption Perception Index* (CPI), Pengangguran, Pertumbuhan Penduduk dan Ekspor-Impor Negara ASEAN tahun 2015 – 2019?
2. Bagaimana Kesejahteraan Masyarakat ASEAN yang dilihat dari dimensi beberapa variabel makroekonomi dan kependudukan?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pemaparan rumusan permasalahan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi:

1. Untuk menganalisis dan menyediakan informasi mengenai Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, *Human Development Index* (HDI), *Corruption Perception Index* (CPI), Pengangguran, Pertumbuhan Penduduk dan Ekspor-Impor Negara ASEAN tahun 2015 – 2019?
2. Untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat ASEAN yang dilihat dari pengaruh beberapa variabel makroekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ekspor-impor serta kelembagaan yang diwakili oleh CPI dan variabel kependudukan yang meliputi pertumbuhan penduduk dan *Human Development Index*.

1.4. Manfaat Penelitian

Selaras akan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Bisamemberikan pengetahuan tentang Kesejahteraan Masyarakat dilihat dari dimensi beberapa variabel makroekonomi dan kependudukan.
- b. Bisadigunakan menjadi sumber informasi baru dan referensi untuk melaksanakan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Bisa memberikan informasi dan pertimbangan untuk para pengambil kebijakan terutama pemerintah negara – negara di ASEAN dalam perumusan kebijakan atau program dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan indeks pembangunan manusia, tingkat korupsi, pengangguran, pertumbuhan penduduk dan Ekspor-Import guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat negaranya.